

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit (Yasa, 2018). Dalam beberapa tahun terakhir, sumbangan sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus mengalami pertumbuhan. PDB mencatat adanya kenaikan dalam lima tahun terakhir, dari 57,84% menjadi 60,34%. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini juga mengalami peningkatan, dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode yang sama. Diprediksi kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2019 akan terus meningkat hingga mencapai 5%.

Selama ini UMKM kerap kali mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah permodalan, masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usahanya (Whetyningtyas, 2016). Selain itu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendanaan dari bank karena dianggap tidak memiliki laporan keuangan yang memadai dan tidak mempunyai pengalaman di sektor keuangan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan yang dialami pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip akuntansi dalam usaha mereka (Hutomo, 2019).

Tren global dan modern yang berlangsung di seluruh dunia saat ini semakin memperkuat posisi penting teknologi dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi saat ini memengaruhi dunia bisnis, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah (UMKM), dalam aspek pengelolaan data transaksi yang berkontribusi dalam menyusun strategi bisnis di masa mendatang (Ristyawan, 2018). Sektor usaha terkena dampak yang cukup besar, dengan hadirnya sistem informasi akuntansi yang menggunakan e-commerce, yang mengubah semua proses transaksi tradisional menjadi digital. E-commerce semakin berkembang di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dan memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi negara tersebut.

Saat ini, e-commerce merupakan teknologi yang berkembang pesat yang dibarengi dengan kemajuan ekonomi (Palinggi & Limbongan, 2020). Menurut informasi yang dirilis oleh Bank Indonesia, terdapat lonjakan yang signifikan dalam jumlah transaksi e-commerce, yaitu sebesar 79,38%. Pada triwulan ketiga tahun 2019, tercatat sebanyak 83,71 juta transaksi, sementara pada triwulan ketiga tahun 2020, jumlah transaksi meningkat menjadi 150,16 juta. Situasi serupa juga terlihat pada nilai transaksi e-commerce, di mana pada triwulan ketiga tahun 2020, nilai total transaksi mencapai 70 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 60 triliun. Diharapkan bahwa tren digitalisasi ini dapat menjangkau para pelaku UMKM yang merupakan sektor penting dalam ekonomi Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Medan. Di Kecamatan Medan Amplas, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan tahun 2022, tercatat 85

usaha mikro dan 7 usaha kecil di Kecamatan Medan Amplas, sementara tidak ada usaha menengah yang terdaftar. UMKM di Kecamatan Medan Amplas beroperasi di berbagai sektor, seperti kuliner, fashion, agribisnis, dan kerajinan tangan. Sektor kuliner menjadi yang paling dominan, sejalan dengan tren yang ada di Kota Medan secara keseluruhan.

UMKM di Kecamatan Medan Amplas turut berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, di balik kontribusinya, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Oleh karena itu, dukungan dan pembinaan dari pemerintah, termasuk pelatihan serta fasilitasi pemasaran digital, sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM di era modern ini.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi UMKM di Kecamatan Medan Amplas, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha mereka. Kualitas laporan keuangan merupakan faktor penting dalam menjaga integritas dan transparansi suatu organisasi. Lemahnya kualitas laporan keuangan dapat memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mengarahkan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya pada pengambilan keputusan yang salah, yang pada akhirnya merugikan organisasi dalam jangka panjang.

Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya bisa digunakan untuk melengkapi persyaratan mengakses modal kepada perbankan tetapi juga berguna sebagai evaluasi usaha untuk menentukan keputusan tepat pada usaha (Kusuma, 2017). Namun masih banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan yang berkualitas dan tidak sesuai dengan standar akuntansi, Sukarno, (2019) mengatakan bahwa pelaku UMKM kadang kala dalam melakukan pencatatan seperti pembukuan laporan keuangan tidak dilakukan sesuai dengan standar yang baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas.

Laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat perlu disajikan dengan transparansi dan menyampaikan informasi yang akurat agar dapat dimengerti oleh pihak yang menggunakan laporan tersebut. Oleh sebab itu, penyampaian informasi yang tepat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sangat krusial untuk memenuhi harapan pengguna laporan keuangan serta membangun otonomi daerah yang sesuai (Erawati & Abdulhadi, 2018).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah wujud tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah/nasional selama periode tertentu. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, perlu ada standar yang memadai seperti relevansi, keandalan, evaluabilitas atau komparabilitas, serta aksesibilitas (Tawaqal & Suparno, 2017). Setiap wilayah mengembangkan panduan melalui metode penyampaian layanan, peningkatan fungsi, pemberdayaan kelompok, dan penyusunan data yang baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berjalannya waktu, kemajuan zaman dan teknologi kini mengalami perubahan signifikan di sektor pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut adalah keyakinan pada pemerintahan yang baik dan demokratis (Good Governance dan Democratic). Ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami kebutuhan terhadap jaringan serta aparat berwenang, yang juga dapat berupaya memberikan layanan yang bertanggung jawab dan transparan (Loka & Handayani, 2020).

Agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka harus diperhatikan juga kualitas orang-orang yang melakukan tugas untuk menyusun laporan keuangan, para pegawai yang terlibat didalamnya harus mengerti dan memahami bagaimana proses serta pelaksanaan akuntansi tersebut berjalan dan berpedoman pada ketentuan serta standar akuntansi yang berlaku umum (Purwanti & Wasman, 2014). Namun masih banyak orang-orang dari pelaku UMKM yang tidak paham akuntansi dan tidak memiliki laporan keuangan sedangkan pelaku yang paham dan memiliki laporan keuangan sangat sedikit bahkan tidak mencapai angka 10%, ketidapkahaman terhadap akuntansi yang merupakan salah satu faktor tidak berkualitasnya laporan keuangan (Suriadi, 2017).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, diperlukan kualitas pada sistem informasi. Salah satu sistem yang dapat mendukung laporan keuangan berkualitas adalah sistem informasi akuntansi. Definisi sistem informasi akuntansi itu sendiri adalah gabungan (integrasi) dari elemen-elemen baik yang bersifat fisik maupun non-fisik yang saling terkait (Komala, 2012).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang berkualitas biasanya didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. Ketiga komponen ini harus saling terhubung sebagai dasar untuk sistem pelaporan keuangan yang efektif (Silviana & Antoni, 2014). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang melakukan pencatatan secara manual. Hanya sekitar 20% pelaku UMKM yang mampu membuat laporan keuangan, meskipun proses penyusunannya masih dilakukan secara manual dan belum beralih ke metode digital, sementara 80% lainnya masih belum melakukan pembukuan (Rahayu, 2017).

Di sisi lain, potensi yang dihadirkan oleh Teknologi Informasi (TI) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat menguntungkan. Dengan penerapan teknologi yang sesuai, UMKM bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta memperluas akses pasar melalui platform e-commerce dan media sosial, sekaligus menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif dan memenuhi kebutuhan konsumen. Di samping itu, bantuan dari pemerintah, lembaga finansial, dan penyedia teknologi juga memiliki peranan penting dalam mendukung UMKM menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mempermudah dan menyelaraskan laporan keuangan di suatu wilayah dengan pusat. Pemerintah berusaha meningkatkan keterbukaan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas (good government governance) (Zulfah, 2020). Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak hanya menjadi tuntutan bagi perusahaan atau lembaga, tetapi juga sudah

menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perkembangan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi institusi atau organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan dengan cepat, tepat, dan benar, dalam rangka memajukan produktivitas (Dewi et al., 2020). Sesuai dengan Inpres No. 4 Tahun 2011, BPKP, khususnya Deputi Pengawasan Bidang Administrasi Keuangan Daerah, menganggap penting untuk mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk melakukan perubahan serta mendorong implementasi pengendalian ekonomi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku, secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan dapat diaudit. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan laporan keuangan yang fair, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Sitinjak (2020) Sesuai dengan Inpres No. 4 Tahun 2011, BPKP, khususnya Deputi Pengawasan Bidang Administrasi Keuangan Daerah, menganggap penting untuk mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk melakukan perubahan serta mendorong implementasi pengendalian ekonomi daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku, secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan dapat diaudit. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan laporan keuangan yang fair, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh Sitinjak & Sinaga (2019) dari sepuluh UMKM pemula, hanya 3 yang menunjukkan tingkat efisiensi dan kecepatan perputaran aset di atas rata-rata, yaitu 2,95%.

Selanjutnya, tujuh UMKM lainnya masih dianggap gagal dalam mengelola usaha mereka dan belum mampu mengoptimalkan perputaran aset. Dari kedua survei ini, bisa dikatakan bahwa saat ini UMKM di Kecamatan Medan-Amplas belum sepenuhnya memiliki kinerja yang baik. Namun, beberapa UMKM justru menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan setelah mulai menjajaki dunia digital dan memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka, seperti e-commerce. Adopsi e-commerce ini kemudian menjadi aspek kunci dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem informasi akuntansi yang berbasis e-commerce.

UMKM di Kecamatan Medan-Amplas memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal, namun kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih menjadi kendala utama. Masalah ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap akuntansi dan kurangnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Kualitas sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat menjadi solusi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, namun implementasinya memerlukan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan pemahaman pengguna. Maka dari itu penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengkaji secara mendalam peranan kualitas sistem informasi akuntansi, pelatihan pengguna, serta pemahaman terhadap teknologi yang digunakan pada UMKM, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan terkhususnya pada UMKM di Kecamatan Medan-Amplas.

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang sebelumnya, adapun identifikasi masalah yang saya ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Adopsi kualitas sistem informasi akuntansi belum sepenuhnya dilakukan oleh UMKM di Kecamatan Medan-Amplas karena kurangnya pemahaman dan pelatihan pengguna.
2. Pelatihan yang kurang memadai dan minimnya literasi teknologi berdampak negatif pada kemampuan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM memerlukan kombinasi dari penyediaan pelatihan, pelatihan teknologi, dan dorongan pemahaman sistem informasi akuntansi secara efektif.
4. Rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM di Kecamatan Medan-Amplas merupakan akibat dari kurangnya pemahaman terhadap akuntansi, minimnya pelatihan teknologi, dan rendahnya adopsi sistem informasi akuntansi.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian hanya berfokus pada UMKM di Kecamatan Medan-Amplas, mengkaji peranan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. fokus pada kendala dan peluang dalam adopsi teknologi informasi oleh UMKM serta penelitian ini tidak mencakup analisis kinerja sektor UMKM di luar wilayah Kecamatan Medan-Amplas atau pada skala nasional.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di ambil pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pelatihan pengguna berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pemahaman dalam penggunaan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kualitas sistem informasi akuntansi, pelatihan pengguna, dan pemahaman dalam penggunaan teknologi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

Menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

1. Menganalisis pengaruh pelatihan pengguna terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Menganalisis pengaruh pemahaman dalam penggunaan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi, pelatihan pengguna, dan pemahaman dalam penggunaan teknologi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperdalam pemahaman tentang konsep dan teori terkait sistem informasi akuntansi, pelatihan pengguna, dan pemahaman teknologi serta bagaimana variabel-variabel tersebut memengaruhi kualitas laporan keuangan. Serta untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang merupakan langkah akhir dalam menyelesaikan program studi, sehingga memungkinkan penulis untuk memperoleh gelar sarjana sesuai bidang studi yang ditempuh.

2. Bagi Institusi

Adapun manfaat penelitian ini bagi institusi yaitu untuk membantu pemerintah daerah dalam merancang pelatihan yang lebih efektif untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM serta menyediakan referensi bagi penelitian akademik di bidang manajemen dan akuntansi UMKM.

3. Bagi Objek Penelitian

Manfaat penelitian bagi objek yang diteliti oleh penulis untuk memberikan wawasan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Medan-Amplas tentang pentingnya sistem informasi akuntansi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan.